Gubernur Minta BPK Berikan Pendampingan Intensif pada OPD

PONTIANAK, SP - Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar melakukan pendampingan intensif kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

"Dalam menyusun rencana kerja, saya akan minta BPK RI Kalbar untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada dinas-dinas agar mereka

• Baca Halaman 15

jelas dan dapat meminimalisir kesalahan saat pelaporan keuangan," kata Sutarmidji saat menghadiri Sertijab Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar dari Joko Agus Setyono kepada Hery Ridwan di Pontianak, Jumat (6/3).

Sutarmidji menyatakan BPK RI sebagai aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga negara, memiliki tugas dan tanggung jawab yang strategi dalam pelaksanaan *good governance*.

Untuk itu, dia berharap agar dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK betul-betul melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara dan standar akuntansi pemerintahan.

"Dalam melaksanakan tugas, pemeriksa keuangan harus tegas, bersih dan tidak boleh menerima apapun. Kemudian pemeriksa keuangan tidak boleh melakukan kesepakatan dengan pihak pemerintah maupun lembaga negara lain," tegasnya.

"Apabila ada temuan pengelolaan keuangan yang tidak baik, berikan penilaian yang sesuai. Dengan sikap tegas pemeriksa keuangan, InsyaAllah pengelolaan keuangan negara akan menjadi baik," tambahnya.

Sutarmidji sependapat dengan apa yang disampaikan anggota BPK RI bahwa pengalokasian anggaran adalah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator-indikatornya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu juga berkomitmen untuk membuat transparansi anggaran. Apapun yang dibuat Pemprov pada APBD tahun berjalan, semua masyarakat harus bisa mengakses, termasuk berapa keuangan pemerintah daerah.

"Saya sudah mulai membuat sistem tersebut supaya penggunaan APBD dapat fokus dan tepat sasaran, serta tidak ada lagi defisit anggaran seperti tahun 2018," tukasnya. **(iat)**